



Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)

Alif Muzhaqi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract: *The presence of village Sustainable Development Goals and village-owned enterprises is crucial to the development of regional economic activities and development as well as a major part of enabling the region to open up decent employment opportunities. The position of BUMDesa and the Sustainable Development Goals program has been regulated in legislation and local government policies. This research is descriptive research using a qualitative approach, namely a study by describing the data that researchers have collected, both data from interviews, observation and documentation during the research. Data analysis techniques used in qualitative research include transcripts of interview results, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of data processing show that Ketapanrame Village has realized a sustainable development program through BUMDesa with 18 objectives of the village sustainable development program. The linkage shows such as the increasing welfare of the community, the lower unemployment rate because BUMDesa absorbs labor and partnerships almost entirely from the total number of villagers, the higher economy because almost all residents become BUMDesa partners. The level of village development is getting higher but the local government still maintains green land for food security and greening. Need for transparency of BUMDesa programs so that every citizen knows and understands entirely. Human Resources also need continuous coaching.*

Keywords: *Sustainable Development, Village-Owned Enterprises*

Abstrak: Kehadiran Sustainable Development Goals desa dan badan usaha milik desa sangat penting bagi perkembangan kegiatan dan pembangunan ekonomi daerah serta bagian utama untuk memungkinkan daerah untuk membuka peluang kerja yang layak. Kedudukan BUMDesa dan program Sustainable Development Goals sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang telah peneliti kumpulkan, baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Desa Ketapanrame sudah mewujudkan program pembangunan berkelanjutan melalui BUMDesa dengan 18 tujuan dari program pembangunan berkelanjutan desa. Keterkaitan tersebut menunjukkan seperti halnya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, tingkat pengangguran yang semakin rendah karena bumdesa menyerap tenaga kerja dan kemitraan hampir seluruhnya dari jumlah total warga desa, perekonomian yang semakin tinggi karena warga hampir keseluruhan menjadi mitra BUMDesa. Tingkat pembangunan desa yang semakin tinggi namun pemerintahan setempat tetap mempertahankan lahan hijau untuk ketahanan pangan dan penghijauan. Perlu transparansi program-program BUMDesa agar setiap warga mengetahui dan mengerti seluruhnya. SDM juga perlu pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang terdiri dari 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, mengindikasikan bahwa untuk mencapai semua tujuan pembangunan tersebut harus melibatkan banyak faktor. Bukan saja negara sebagai entitas yang paling memiliki otoritas dan kekuasaan, tetapi juga aktor non-negara perlu dilibatkan agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana hingga akar rumput (Queralt & Sala, 2018). Jika kembali berkaca pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional, maka beberapa aktor dapat mengambil peran dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals*, mulai dari pemerintah

pusat sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai semua target *Sustainable Development Goals* maka pemerintah daerah juga harus melakukan aksi, termasuk di Indonesia (Yusuf, 2017). Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB tersebut. Komitmen yang ditunjukkan Indonesia adalah dengan menyesuaikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan agenda pembangunan Presiden Joko Widodo (Kementerian PPN, 2020).

Sustainable Development Goals desa merupakan upaya terkoordinasi untuk menjadikan desa tanpa kemiskinan, sesuai Alisjahbana dan Murniningtyas (2018 : 63) “Empat titik tumpuan tersebut untuk menunjukkan adanya dan pentingnya keselarasan antara 3 titik tumpu utama, yaitu tumpuan/aspek sosial, aspek moneter dan aspek ekologi yang ditegakkan oleh titik dukungan administrasi”. Keempat poin dukungan *Sustainable Development Goals* ini relevan dengan tujuan perbaikan keuangan public serta tujuan kemajuan wilayah. Sebagai salah satu Negara yang menyepakati rencana *Sustainable Development Goals* maka terbitnya Perpes Nomer 59 Tahun 2017 menyangkut pelaksanaan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals*.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa melalui pengembangan usaha ekonomi di desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Sustainable Development Goals desa merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, terdiri dari 18 tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan Menurut Alisjahbana dan Murniningtyas (2018 : 63) “Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi social, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang di dukungdengan pilar tata kelola”. Keempat pilar *Sustainable Development Goals* ini relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi secara nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah. Sebagai salah satu Negara yang menyepakati agenda *Sustainable Development Goals* adalah terbitnya perpes Nomer 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*.

Prinsip implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

Penerapan *Sustainable Development Goals* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah Indonesia menyadari pencapaian *Sustainable Development Goals* sampai tahun 2030 tidak mungkin dapat dicapai, apabila kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hanya dapat terjadi di tingkat nasional. Artinya, agar implementasi dan pencapaian *Sustainable Development Goals* dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak termasuk elemen pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dimana daerah memiliki kearifannya tersendiri dengan budaya, kondisi sosial ekonomi sampai beberapa infrastruktur dan sarana prasarana sehingga dibutuhkan rencana aksi daerah pada pembangunan berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa melalui pengembangan usaha ekonomi di desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* yang telah dicanangkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menurut Oakley (dalam Gitosaputro dan Rangga 2015 : 27) ialah “suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan dan bina kelembagaan yang kemudian dikembangkan untuk melengkapi ketiganya.

Pengertian Desa

Desa menurut Widjaja (2012:3) ialah “suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6) mengatakan bahwa : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Hal ini didukung dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 ayat 2 tentang Badan Usaha Milik Desa “Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa”. Dalam Nawacita ketiga “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, pemerintah berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Klasifikasi jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenis usaha yang dapat dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni:

- a. Bisnis Sosial
- b. Keuangan/ Banking
- c. Bisnis Penyewaan/ Renting
- d. Lembaga Perantara
- e. Perdagangan
- f. Usaha Bersama
- g. Kontraktor

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat dan untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha desa dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan terbuka untuk masyarakat desa.
3. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat emosional, sehingga penilaian kesejahteraan terhadap setiap individu bersifat unik atau perkumpulan dan keluarga berbeda satu sama lain. Bagaimanapun, pada tingkat mendasar, kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan penting. Dengan asumsi kebutuhan pokok segelintir orang terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan terhadap individu atau keluarga tersebut telah terpenuhi. Jika persyaratan mendasar tidak terpenuhi, dapat dikatakan individu atau keluarga tersebut berada dalam kemiskinan. Untuk menunjang tercapainya kemajuan daerah yang diharapkan dengan bekerjanya kesejahteraan daerah setempat seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2019 : 105) ialah “usaha menumbuhkan kemampuan daerah setempat, yang mampu menyelidiki dan mempergunakan setiap kekayaan yang dimilikinya. Dukungan adalah prosedur yang mungkin dilakukan dalam upaya kesejahteraan untuk perbaikan yang terfokus pada individu”. Sejalan dengan itu, penerapan perbaikan praktis di daerah pedesaan dapat diakui dalam pengembangan lebih lanjut kesejahteraan daerah.

Kriteria kesejahteraan

Kriteria kesejahteraan sangat beragam, karena kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat
2. Kesejahteraan individu
3. Kesejahteraan Sosial

Indikator Kesejahteraan

Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup, diantaranya:

1. kependudukan,
2. kesehatan dan gizi,

3. pendidikan,
4. ketenagakerjaan,
5. taraf dan pola konsumsi,
6. perumahan, serta sosial lainnya.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang telah peneliti kumpulkan, baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian. yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual serta memahami dan menjelaskan dengan argumen yang tepat. Metode penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin (2011 : 69) ialah “penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini ditafsirkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis atau membuat generalisasi”.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini menjadi tempat penelitian penulis untuk mengetahui implementasi *Sustainable Development Goals* Desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini dilakukan pada

Penelitian ini dilakukan di desa Ketapanrame ini menggunakan tiga tahap dalam proses pengerjaan penelitian yaitu; Tahap Pembuatan Proposal; Pra-Lapangan. Tahap survey pekerjaan lapangan atau Pelaksanaan di Kampung Warebo. Observasi, wawancara, Dokumentasi. Tahap Menganalisis Hasil Penelitian Triangulasi di Desa Ketapanrame. Tahap Penyelesaian Penelitian di Desa Ketapanrame.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini melibatkan empat informan yaitu: masyarakat desa Ketapanrame, Manajer bidang wisata di kantor BUMDesa Mutiara Welirang, Kepala BUMDesa Mutiara Wekirang, Kepala Desa Ketapanrame. Sesuai dengan tujuan penelitian, semua informan yang terlibat pada penelitian di Desa Ketapanrame memiliki latar belakang yang berbeda-beda sesuai

dengan kapabilitasnya masing-masing. Di awal pada bagian perincian waktu penelitian di Desa Ketapanrame, peneliti telah menyebutkan bahwa sebelumnya telah melakukan tahap pra-riset penelitian yang akan dilakukan di Desa Ketapanrame ini menggunakan tiga tahap dalam proses pengerjaan yaitu; tahap pembuatan proposal, Pra-lapangan, tahap survei pekerjaan lapangan atau pelaksanaan di Desa Ketapanrame (Observasi, wawancara, dokumentasi). Tahap menganalisis hasil penelitian triangulasi di Desa Ketapanrame. Tahap penyelesaian penelitian di Desa Ketapanrame. Sebelumnya peneliti telah mendapatkan surat permohonan ijin penelitian dari universitas yang ditujukan kepada BAKESBANGPOL JATIM. Setelah mendapatkan surat rekomendasi penelitian dari BAKESBANGPOL JATIM ditujukan kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Mojokerto. Setelah mendapatkan surat rekomendasi penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Mojokerto dan mendapatkan tanda tangan dari bupati Mojokerto ditujukan Kecamatan Trawas. Setelah itu peneliti mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di Desa Ketapanrame. Berikut merupakan penjelasan mengenai jalannya pengurusan surat rekomendasi penelitian yang peneliti lakukan di Desa Ketapanrame.

Deskripsi Informan

1. Masyarakat (Ibu Kariani)

Peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat wisata yang dikelola oleh BUMDesa Mutiara Welirang. Peneliti kemudian mendatangi tempat tinggal warga tersebut. Peneliti kemudian memberikan pertanyaan pengantar seputar identitas dan pendapat pribadi tentang BUMDesa Mutiara Welirang. Salah satu warga ini memenuhi kriteria sebagai informan penelitian, diantaranya beliau merupakan warga asli yang tinggal di sekitar tempat wisata yang dikelola oleh BUMDesa Mutiara Welirang dan bersedia untuk menjadi informan penelitian.

Di kediaman warga tersebut, peneliti sempat membicarakan banyak hal seputar kehidupan warga di desa Ketapanrame. Kemudian peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan durasi dua jam. Proses wawancara mendalam terkait pandangan terhadap BUMDesa Mutiara Welirang yang peneliti laksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 dengan lama waktu sekitar 2 jam. Dokumentasi juga termasuk dalam teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan. Dokumentasi yang peneliti kumpulkan adalah gambar ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan warga Ibu Kariani.



Gambar 1 Informan warga Bu Kariani

(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di Desa Ketapanrame)

2. Masyarakat (Pak Radi)

Peneliti mendapatkan informan beliau dikarenakan selama melakukan penelitian, peneliti tinggal di rumah beliau. Selama peneliti tinggal di rumah beliau, peneliti sempat beberapa kali komunikasi yang menyinggung tentang BUMDesa Mutiara Welirang dan beliau mengetahui bagaimana seluk beluk BUMDesa tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, Pak Radi memenuhi kriteria untuk menjadi informan penelitian di Desa Ketapanrame. Latar belakang informan Bapak Radi adalah petani di sawah dan bisa dikatakan salah satu tetua di salah satu dusun yang ada di desa Ketapanrame. Beliau juga sudah tinggal dari lahir di Desa Ketapanrame, jadi mengetahui bagaimana keadaan desa sebelum dan sesudah adanya BUMDesa Mutiara Welirang. Penggalan data yang peneliti lakukan pada informan Bapak Radi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara beberapa kali melalui komunikasi ketika duduk-duduk bersama di depan rumah sekaligus untuk terciptanya pendekatan yang lebih kompleks. Durasi wawancara yang dilakukan rata-rata terjadi selama sekitar 4 jam. Dokumentasi berupa gambar ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan juga menjadi data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan selama peneliti tinggal di rumah Bapak Radi yaitu tanggal 24 Juli Agustus 2023 sampai 24 Agustus 2023.



Gambar 2 Informan warga Bapak Radi

(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di Desa Ketapanrame)

3. Manajer bidang wisata (Pak Saifudin)

Peneliti mendapatkan informasi informan Bpk. Saifudin ketika tinggal di rumah Pak Radi yang ternyata Pak Saifudin merupakan anak dari Bpk. Radi sendiri. Latar belakang informan merupakan seorang manajer bidang wisata di kantor BUMDesa Mutiara Welirang. Peneliti melakukan pendekatan dengan mengobrol seputar bagaimana kondisi desa, penelitian skripsi yang akan dilakukan di desa Ketapanrame, selain itu juga saling tukar cerita baru dan bercanda tawa. Setelah itu peneliti memastikan informan ini sudah cukup masuk kedalam kategori informan yang dibutuhkan, diantaranya merupakan manajer bidang wisata yang dalam kesehariannya bekerja di kantor BUMDesa Mutiara Welirang dan bersedia menjadi informan penelitian. Pada hari berikutnya kebetulan bertemu dengan Pak Saifudin ketika datang kerumah, kemudian peneliti mengatur waktu dengan informan untuk melakukan wawancara terkait Pembangunan Berkelanjutan melalui BUMDesa dan Pak Saifudin memberi saran untuk dilaksanakan wawancara pada saat itu juga. Wawancara dilakukan di rumah Pak Radi selaku Orang Tua dari Pak Saifudin pada pukul 16.00 WIB. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan dan kebijakan yang berisi tentang identitas dan pengalaman sebagai manajer bidang wisata di kantor BUMDesa. Selama wawancara, Pak Saifudin menjawab semua pertanyaan dengan begitu santai dan jelas sembari bercerita dari awal Pak Saifudin bekerja di BUMDesa sampai saat ini. Keseharian informan saat ini sering mendatangi tiap wisata-wisata yang dikelola oleh BUMDesa. Proses wawancara dengan informan berlangsung selama lebih kurang dua jam. Data yang akan menjadi pelengkap dari penelitian ini adalah gambar ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan manajer bidang wisata yaitu Pak Saifudin.



Gambar 3 Informan Manajer Bidang Wisata Bapak Saifudin
(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di Kantor BUMDesa)

4. Kepala BUMDesa Mutiara Welirang (Bapak Herwanto)

Peneliti mendapatkan informan Bapak Herwanto dari Bapak Zainul Arifin selaku Kepala Desa Ketapanrame. Beliau memberikan nomer kontak *whatsapp* kepada peneliti untuk melakukan komunikasi untuk meminta izin dan melakukan janji pertemuan untuk melakukan wawancara. Latar belakang informan adalah seorang kepala BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame. Peneliti melakukan pendekatan awal melalui obrolan di *whatsapp* untuk melakukan janji pertemuan dengan tujuan wawancara. Beliau langsung memberikan izin untuk

menjadi informan dan siap untuk diwawancarai di keesokan harinya di kantor BUMDesa. Keesokan harinya ketika bertemu dengan beliau, obrolan diawali dengan obrolan santai tentang dirumah siapa tinggalnya di Desa ini ?, apakah peneliti nyaman tinggal di Desa Ketapanrame ? dan lain sebagainya. Setelah beberapa saat, peneliti mulai masuk kedalam topik bahasan. Beliau menjawab tiap pertanyaan dengan begitu jelas dan rinci sehingga informasi yang didapatkan begitu lengkap. Wawancara dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam dikarenakan beliau akan ada urusan di luar kantor.



Gambar 4 Informan Kepala BUMDesa Mutiara Welirang Bapak Herwanto

(Sumber: Hasil dokumentasi Penelitian di Kantor BUMDesa)

5. Kepala Desa Ketapanrame (Bapak Zainul Arifin)

Peneliti mendapatkan informan Bapak Zainul Arifin ketika pertamakali datang di Desa Ketapanrame untuk meminta izin melakukan penelitian di Desa Ketapanrame. Pada awal pertemuan dengan beliau, peneliti belum mengetahui yang menerima surat penelitian adalah beliau sendiri yang sebagai Kepala Desa. Beliau sangat *humble* kepada warga dan tamu yang ada sampai-sampai peneliti tidak mengetahui bahwa beliau adalah Kepala Desa. Beliau juga setelah menerima surat penelitian peneliti, dengan ramahnya mengantarkan peneliti ke kantor BUMDesa Mutiara Welirang. Setelah beberapa hari kemudian, peneliti menghubungi Bapak Zainul Arifin untuk mengatur waktu pertemuan agar peneliti bisa melakukan wawancara dengan beliau. Beliau menyanggupi untuk diwawancarai dan menjadi informan pada keesokan harinya. Wawancara dilangsungkan pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Kepala Desa. Wawancara berlangsung kurang lebih selama 45 menit dikarenakan beliau ada tamu yang menunggu di luar ruangan.



Gambar 5 Informan Kepala Desa Ketapanrame Bapak Zainul Arifin

(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di Kantor Kepala Desa Ketapanrame)

Pembahasan

Hasil dari penelitian Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDesa Mutiara Welirang, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur) ini merupakan proses penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti dalam kurun waktu selama satu bulan dari 24 Juli 2023 sampai 24 Agustus 2023 dengan sepenuhnya telah melengkapi persyaratan administrasi penelitian mulai dari pengurusan surat izin penelitian dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, hingga persetujuan persetujuan melakukan penelitian di Desa Ketapanrame oleh ; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, Bupati Kabupaten Mojokerto, Camat Kecamatan Trawas.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Mutiara Welirang, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). Selanjutnya, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa ketapanrame. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ketapanrame adalah sebagai berikut;

1. Mendatangi informan masyarakat di Desa Ketapanrame (Ibu Kariani)
2. Mendatangi informan masyarakat di Desa Ketapanrame (Bapak Radi)
3. Mendatangi informan manajer bidang wisata di kantor BUMDesa Mutiara Welirang (Bapak Saifudin)
4. Mendatangi informan Kepala BUMDesa Mutiara Welirang (Bapak Herwanto)
5. Mendatangi informan Kepala Desa Ketapanrame (Bapak Zainul Arifin)
6. Mendatangi wisata yang dikelola BUMDesa Mutiara Welirang

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan hasil penelitian di Desa Ketapanrame, selanjutnya disusun dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga berbentuk rangkaian informasi penting yang sesuai dengan masalah penelitian. Hasil observasi secara langsung di Desa Ketapanrame pada tanggal 03 Agustus 2023 dan adapun wawancara mendalam terhadap informan yang didapatkan, kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sehingga setiap informasi yang didapatkan akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan dalam rumusan masalah tersebut.

2. Tahap kedua yang dilakukan peneliti adalah mereduksi hasil penelitian di Desa Ketapanrame. Kategorisasi antara hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan topik pembangunan berkelanjutan melalui Badan Usaha Milik Desa. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam yang didapatkan, dikelompokkan sesuai dengan siapa yang telah menyampaikan informasi yang didapat, dalam hal ini adalah informan penelitian di Desa Ketapanrame.
3. Tahap ketiga yang dilakukan peneliti adalah menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Ketapanrame. Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut disesuaikan dengan informan yang mengatakan serta rumusan masalah yang sudah disusun. Hasil penelitian di Desa Ketapanrame yang sudah tersusun tersebut kemudian ditampilkan secara rapi agar mudah dipahami
4. Tahap keempat yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. Setelah semuanya disusun, maka melakukan pembahasan yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian di Desa Ketapanrame yang peneliti kumpulkan selanjutnya diuji untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan yang peneliti dapatkan di lapangan. Peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan di Desa Ketapanrame, hasil observasi kemudian di dokumentasikan. Observasi yang dilakukan di Desa Ketapanrame.

Pengembangan BUMDesa Guna Mewujudkan Program SDGs di Desa Ketapanrame

Adapun BUMDesa sangat erat hubungannya dengan SDGs Desa. Dengan adanya BUMDesa maka akan membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian SDGs Desa. Seperti yang dikatakan oleh informan manajer bidang wisata Bapak Saifudin *“BUMDesa sudah menerapkan program pembangunan berkelanjutan, karena BUMDesa sendiri berupaya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa seperti halnya*

kesejahteraan, perekonomian, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya". Dari informasi tersebut memberi jawaban bahwasanya program dan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa berawal dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat Desa. Pengembangan yang dilakukan di Desa Ketapanrame melalui BUMDesa Mutiara Welirang sendiri memiliki 5 unit usaha dalam mewujudkan 18 tujuan program SDGs Desa, yaitu unit usaha pengelolaan air minum, unit usaha kebersihan lingkungan, unit kios dan lahan ternak, unit usaha permodalan dan kemitraan, unit usaha wisata. *"pada tahun 2001 BUMDesa memiliki unit usaha pertama yaitu unit usaha pengelolaan air minum, pada tahun 2010 mulai merintis usaha yang baru secara bertahap yaitu unit pengelolaan kebersihan lingkungan, pengelolaan kios dan kandang ternak, pengelolaan wisata, dan pengelolaan unit simpan pinjam dan mitra"*. Ucapan informan Bapak Zainul Arifin Kepala Desa Ketapanrame.

Penghargaan Desa Ketapanrame

1. Juara I lomba BUMDesa terbaik 2020 tingkat Provinsi Jawa Timur
2. Juara I Desa Sejahtera Astra tahun 2020 tingkat Nasional
3. Juara II Desa Brilian Tingkat Nasional tahun 2022
4. Sebagai desa Prospektif good governance pengelolaan keuangan Desa Terbaik tahun 2021 dari Dirjen perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur Kementerian keuangan
5. 300 besar Anugerah Desa Wisata Tahun 2021-2022 oleh Kemenparekraf
6. Tokoh pariwisata Inspiratif oleh Disbudporapar Kabupaten Mojokerto tahun 2022
7. Desa wisata terbaik oleh Disbudporapar Kabupaten Mojokerto tahun 2022
8. Penghargaan Community Development and Engagement BUMDesa award Nasional 2022
9. Desa wisata Cerdas Mandiri Sejahtera oleh Disbudpar Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
10. 15 besar Promosi Desa Wisata Nasional Tahun 2022 oleh Kemendes PDTT
11. BUMDesa Inspiratif kategori BUMDesa Bermanfaat oleh Kementerian Desa PDT Tahun 2023
12. 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh kemenparekraf tahun 2023
13. Meraih Desa Wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kemenparekraf tahun 2023

Hambatan dan Dukungan Dalam Mengembangkan Usahanya

1. Hambatan

"hambatan yang paling mendasar adalah SDM yang ada. Karena Kepala Desa mensyaratkan yang bisa menjadi karyawan atau pekerja adalah warga setempat, namun warga setempat mempunyai kapasitas SDM tidak ada yang spesialis di bidang yang

dibutuhkan. Oleh karena itu, BUMDesa melakukan pembinaan-pembinaan dengan mendatangkan orang-orang yang memang kompeten di bidang itu.”

Menurut pernyataan informan Kepala BUMDesa Bapak Herwanto tersebut, hambatan yang paling mendasar adalah SDM yang ada. Kapasitas SDM tidak ada yang spesialis di bidang yang dibutuhkan. Dikarenakan SDM yang ada masih kurang siap terhadap perubahan-perubahan yang semakin modern. SDM masih membutuhkan pembinaan-pembinaan dengan mendatangkan orang-orang yang memang kompeten di bidang tersebut.

2. Dukungan

Kepala Desa Bapak Zainul Arifin mengatakan bahwa *“yang pasti BUMDesa mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa salah satunya dengan modal. Contoh modal untuk mengelola Aset Desa, Tanah Kas Desa itu kami serahkan untuk dikelola agar BUMDesa bias bergerak dalam pengembangannya. Contoh wisata, wisata bias berjalan kalau ada beberapa asset kita yang kita hibahkan untuk wisata. Contoh kandang dan kios, ketika BUMDesa tidak memiliki lahan kan tidak mungkin, maka kita korbankan Tanah Kas Desa untuk didirikan kandang ternak dan kios, sehingga itu termasuk beberapa dukungan yang kita bisa berikan kepada BUMDesa. Kita juga mengupayakan bantuan-bantuan dari pihak ketiga, CSR, serta kami support dari dana Desa”*. Sesuai pernyataan tersebut memang Pemerintahan Desa sangat mendukung tentang semua kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa. Dengan memberikan fasilitas dana Desa, Tanah Kas Desa yang dapat dipergunakan untuk pengembangan BUMDesa dan mengupayakan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga.

Dukungan yang didapatkan juga dari pihak PERHUTANI setelah pihak pemerintahan desa dan BUMDesa melakukan mediasi dengan pihak PERHUTANI untuk kerjasama di area wisata dlundung. Mediasi ini dilakukan karena pemerintahan desa ingin BUMDesa mendapatkan pemasukan dari wisata tersebut yang pada dasarnya wisata tersebut berada pada wilayahnya.

Investasi Warga Desa

Investor yang dimaksud adalah investor dari masyarakat Desa Ketapanrame sendiri. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menjadi investor dalam pembangunan wisata yang sedang dilakukan. Pemerintahan Desa membuat kebijakan bahwa yang bisa terlibat dalam investasi hanya warga Desa Ketapanrame, diluar Desa dilarang melibatkan diri untuk menjadi investor.

“kelompok investasi ini kita terapkan untuk bekerjasama mengembangkan wisata baik di taman ghanjaran dan sumber gempong dengan menambah beberapa wahana permainan yang dikelola oleh mereka sendiri” ucap Kepala Desa Bapak Zainul Arifin.

Kelompok investasi tersebut adalah sebagai mitra BUMDesa untuk bekerjasama dalam pengembangan wisata. Wahana permainan yang ada di tempat wisata tersebut juga mitra sendiri yang mengelola mulai dari penjualan tiket, perekrutan pegawai, penggajian. Dikarenakan kelompok investasi adalah mitra BUMDesa dan adanya MoU, jadi BUMDesa hanya menerima pendapatan 10% dari pendapatan mereka dalam penjualan tiket.

Pelaku investasi ini juga dibatasi 1 KK maksimal hanya bisa investasi sebanyak 10 lembar dengan harga per lembar sebesar 1 juta rupiah. Pembatasan ini beralasan untuk pemerataan dan tidak dikuasai oleh satu dua orang yang memiliki uang. Pembagian hasil yang akan didapat investor berasal dari 87,5 % dari SHU wisata. Per lembar diasumsikan mendapat minimal 3%. Dalam pelaksanaan 2 tahun terakhir rata-rata BUMDesa dapat membagi diatas 5 – 30% per lembar tiap bulannya.

Dampak Ekonomi pada Masyarakat

Peluang usaha bagi masyarakat semakin meningkat dengan jumlah Mitra Usaha sebagai berikut:

1. Mitra pedagang 2 kelompok dengan jumlah 126 Rumah Tangga
2. Mitra Urun Dana 2 kelompok dengan jumlah 533 Rumah Tangga
3. Mitra parkir 3 kelompok dengan jumlah 85 orang
4. Mitra POKDARWIS 38 orang
5. Mitra kelompok sawah 19 orang
6. Mitra UMKM 9 kelompok

Analisa Hasil Penelitian

Kehadiran *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak. Sebagaimana yang terdapat pada tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa pada tujuan ke enam (6) yaitu desa layak air bersih dan sanitasi, tujuan ke delapan (8) yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, tujuan ke tujuh belas (17) yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yakni dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dapat dilihat pada table dibawah ini tentang tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa yang sudah ada dan belum ada:

Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)

No.	Tujuan SDGs desa	Sudah/belum	Keterangan
1	Desa tanpa kemiskinan	Sudah	Jumlah keterlibatan masyarakat dalam usaha BUMDesa dicapai dengan tahun 2022 sebanyak 899 KK sebesar 48,4% dari 1.857 KK
2	Desa tanpa kelaparan	Sudah	Pembangunan di Desa tidak mengurangi lahan pertanian warga. lahan pertanian warga dimanfaatkan menjadi wisata alam, sawah seperti di wisata Sumber Gempong. Selain itu juga dibangun kolam ikan guna ketahanan pangan Desa.
3	Desa sehat dan sejahtera	Sudah	Adanya peluang usaha yang semakin meningkat, pengangguran yang semakin berkurang akan meningkatkan pula kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pada bagian 2,5% dari usaha wabana dan 5% dari SHU BUMDesa penggunaannya salah satunya mencakup untuk kesehatan desa.
4	Pendidikan desa berkualitas	Sudah	Pada bagian 2,5% dari usaha wabana dan 5% dari SHU BUMDesa penggunaannya salah satunya mencakup untuk pendidikan desa
5	Keterlibatan perempuan desa	Sudah	Desa tidak membatasi gender masyarakat dalam pengembangan desa.
6	Desa layak air bersih dan sanitasi	Sudah	Akses 100% layanan Air Bersih pada masyarakat
7	Desa berenergi bersih dan terbarukan	Sudah	Desa sudah mengolah sampah plastic menjadi BBM yang dalam penggunaannya hanya dipergunakan untuk keperluan desa
8	Pertumbuhan ekonomi desa merata	Sudah	sepertihalnya mesin pemotong rumput dll. Namun tidak diperjual belikan karena tidak ada izin penulian BBM
9	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	Sudah	Melibatkan seluruh masyarakat Desa dalam pengembangan Desa seperti pada wisata yang menyerap tenaga kerja, memberikan lahan stand usaha di tempat wisata, dll yang pada dasarnya seperti Investasi, tenaga kerja hanya diperuntukan kepada masyarakat Desa Ketapanrame saja.
10	Desa tanpa kesenjangan	Sudah	Pembangunan infrastruktur Desa seperti salah satunya jalan sudah hampir seluruh wilayah sudah diperbaiki, desa juga membangun kolam ikan untuk ketahanan pangan desa.
11	Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	Sudah	Penyerapan tenaga kerja sudah hampir mencakup seluruh masyarakat desa. SHU BUMDesa juga dipergunakan salah satunya adalah bedah rumah agar tidak ada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni
12	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan	Sudah	Pemberian bantuan bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni, adanya pengamanan di tiap desa/dusun, budaya yang masih lestari, terdapat pengolahan sampah hingga tidak ada limbah yang terbuang, terdapat lahan hijau/lapangan di desa
13	Desa tanggap perubahan iklim	Sudah	Pembangunan desa tidak mengurangi lahan produksi pangan lahan hijau. Seperti pada wisata sumber gempong yang tidak membuang area persawahan yang pada dasarnya lahan tersebut adalah lahan hijau desa
14	Desa peduli lingkungan laut	Belum	Desa telah membangun infrastruktur seperti drainase agar ketika hujan lebat tidak terjadinya banjir, dan ketika musim kemarau masyarakat tidak kekeringan dikarenakan adanya pengolahan sumber air yang baik
15	Desa peduli lingkungan darat	Sudah	Karena Desa Ketapanrame berada pada wilayah dataran tinggi/pertbukitan
16	Desa damai berkeadilan	Sudah	Desa tetap mempertahankan lahan hijau dan perawatan agar tetap asri.
17	Kemitraan untuk pembangunan Desa	Sudah	Angka kriminalitas sangat kecil, gotong royong yang masih dilestarikan, adanya bantuan kepada warga yang kurang mampu, transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa.
18	Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif	Sudah	Desa sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti BUMN, Swasta, dan Akademisi. Tersedianya jaringan internet yang lancar.
			Gotong royong yang masih dilakukan tanpa melihat suku, agama, ras dan golongan; seluruh elemen masih berpartisipasi dalam musdes dan pembangunan desa, budaya yang masih dilestarikan

Tabel 1.1 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) desa

Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan Desa yang ada di Desa Ketapanrame yang mempengaruhi suatu pembangunan yang ada di Desa. Apabila seluruh Desa telah menerapkan program pembangunan berkelanjutan dengan baik, maka pembangunan Negara dapat berkembang dengan baik pula.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembangunan berkelanjutan melalui Badan Usaha Milik Desa Mutiara Welirang yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Desa Ketapanrame sudah mewujudkan program pembangunan berkelanjutan melalui BUMDesa dengan 18 tujuan dari pembangunan berkelanjutan desa.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BUMDesa Mutiara Welirang untuk mewujudkan Program Pembangunan Berkelanjutan dengan berbagai hambatan dan dukungan yang dihadapi dan diterima. BUMDesa mendapatkan berbagai dukungan mulai dari alam, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, beberapa mitra pihak ketiga dan Masyarakat Desa Ketapanrame Sendiri. Kepala Desa Ketapanrame memberikan statement dengan senyumnya bahwa pendukung terbesar adalah alam itu sendiri. Namun hambatan yang dihadapi lebih berpusat pada SDM yang belum siap akan pembangunan yang semakin cepat dan modern.

Di Desa Ketapanrame, BUMDesa Mutiara Welirang sendiri lebih menonjolkan pada usaha wisata untuk menunjang berlangsungnya program pembangunan berkelanjutan Desa. Dari berkembangnya wisata yang ada di Desa Ketapanrame, 18 tujuan pembangunan berkelanjutan Desa bisa terwujud sepertihalnya angka kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin tinggi, tingkat pengangguran masyarakat yang semakin berkurang, Dll.

Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Desa Ketapanrame dapat dikatakan cukup lengkap, antara lain: sudah tersedia lahan untuk membuka usaha, air bersih yang melimpah, ambulan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, penginapan untuk wisatawan, pemberian pinjaman modal untuk usaha, jalan di setiap desa sudah dibangun dengan baik.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mewujudkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Ketapanrame sudah dilakukan BUMDesa semaksimal mungkin, diantaranya: pengembangan unit wisata, unit air minum dan sanitasi, unit kebersihan lingkungan, unit kios dan lahan ternak, unit usaha permodalan dan kemitraan.

Dari beberapa kesimpulan diatas, dapat ditarik menjadi satu kesimpulan yang lebih singkat bahwa pembangunan berkelanjutan melalui BUMDesa pada BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame dapat diwujudkan melalui pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa, sehingga hal tersebut dapat menjadikan 18 tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) bisa terwujud di Desa Ketapanrame.

Optimalisasi unit-unit usaha di Desa Ketapanrame sangat berhubungan karena ketika unit-unit usaha ini dikembangkan secara maksimal, maka 18 tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan terwujud dengan selaras.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti memiliki keterbatasan waktu yang lama pada proses perizinan penelitian pada saat di BAKESBANGPOL Kabupaten Mojokerto, dikarenakan menunggu tanda tangan dari Bupati.

Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Ketapanrame, maka peneliti dapat memberikan saran kepada masyarakat, Manajer Bidang Wisata, Kepala BUMDesa, Kepala Desa sebagai berikut:

1) Kepada Masyarakat

1. Berperan aktif secara menyeluruh dalam mengembangkan Desa. Dalam arti mendukung penuh setiap proses BUMDesa dalam mengembangkan Desa melalui program-program yang telah dibuat bersama. Sepertihalnya dibidang wisata yaitu oleh-oleh khas Desa Ketapanrame dan kearifan lokal lainnya agar terjadinya ekonomi yang berbasis kemasyarakatan
2. Menjaga kelestarian budaya yang ada, kelestarian alam karena wilayah Desa Ketapanrame memiliki letak geografis dataran tinggi perbukitan dan yang dicari oleh masyarakat luar adalah keindahan alamnya.
3. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
4. Tidak merusak fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan di tempat-tempat wisata

2) Manajer bidang wisata

1. Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan potensi yang ada di Desa Ketapanrame dan menyuguhkan ciri khas dari Desa Ketapanrame dengan mengedepankan kearifan local
2. Berinovasi secara terus menerus agar tiap wisata tetap memiliki ketertarikan dari masyarakat umum.
3. Melakukan peremajaan dari setiap tempat wisata
4. Merenovasi kolam renang yang ada di wisata Sumber Gempong, peneliti sendiri menilai bahwa dasar dari kolam tersebut terlalu berbahaya bagi pengunjung karena memang pada dasarnya dasar dari kolam tersebut adalah bebatuan kecil. Namun, terdapat beberapa sisi terdapat beton yang apabila pengunjung tidak mengetahui, akan

terluka oleh sisi dan ujung dari beton tersebut. Apalagi dasar dari kolam tersebut adanya lumut yang membuat semakin licin

5. Memberikan paket wisata pengenalan dari setiap unit usaha BUMDesa, pengenalan tiap wisata yang ada di Desa Ketapanrame. Paket tersebut dapat berfungsi untuk pengenalan tiap usaha yang dikelola BUMDesa dan wisata apa saja yang ada. Maka dengan adanya paket tersebut, pengunjung tidak hanya mengetahui salah satu wisatanya saja dan dapat berimbas pendapatan tiap wisata tetap stabil tidak condong hanya salah satu wisata saja.

3) Kepala BUMDesa Mutiara Welirang

1. Memaksimalkan seluruh unit-unit usaha yang dikelola BUMDesa
2. Memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Ketapanrame
3. Terus berinovasi agar pendapatan terbesar tidak hanya berasal dari bidang wisata

DAFTAR PUSTAKA

'1777-6412-1-PB' (no date).

2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (no date).

'4_BAB 1' (no date).

'b1' (no date).

Dakwah Dan, F. (no date) *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI PEKON CIPTA WARAS KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT SKRIPSI* Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah Oleh: LIA KHOLILATUL ARIFAH NPM: 1541020050 Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam.

Di, M. et al. (no date) *SKRIPSI Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.*

KEBIJAKAN DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA - Google Books (no date). Available at: https://www.google.co.id/books/edition/KEBIJAKAN_DANA_DESA_BAGI_PEMBERDAYAAN_MA/igRAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=aprilia+theresia&pg=PA18&printsec=frontcover (Accessed: 19 April 2023).

'MASTA DAHLIA NAPITUPULU' (no date).

Oleh, S. (no date) *PELAKSANAAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENGURANGI KEMISKINAN SKRIPSI* Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Sosial Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu.

PERPRES No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan [JDIH BPK RI] (no date). Available at:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
(Accessed: 19 April 2023).

PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa [JDIH BPK RI] (no date). Available
at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
(Accessed: 19 April 2023).

Rizki, K., Sood, M. and Husni, V. (2022) 'Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah:
Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
di Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Papua Journal of Diplomacy and International
Relations*, 2(1), pp. 59–80. Available at: <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1944>.

Sekilas SDGs (no date). Available at: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> (Accessed: 19
April 2023).

(PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa [JDIH BPK RI], no date)

*(PERPRES No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan [JDIH BPK RI]*, no date)

(Oleh, no date)

(Dakwah Dan, no date)

(Di *et al.*, no date)

(Rizki, Sood and Husni, 2022)

*(2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, no date)

('MASTA DAHLIA NAPITUPULU', no date)

('b1', no date)

('4_BAB 1', no date)

('1777-6412-1-PB', no date)